



பின்புலம்
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பின்புலம்

BADAN PENGHUBUNG

பின்புலம் / பின்புலம் (021) 31925567
JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567
பின்புலம் (பின்புலம் / பின்புலம்)
JAKARTA (KODE POST 10330)
Laman : www.perwakilan.baliprov.go.id, Pos-el : banhub@baliprov.go.id

Jakarta, 28 Mei 2025

Yth. Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali

di –

Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR : B.35.000/1905/TU/BANHUB

No	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Layanan Informasi Publik Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2024	1 (Satu) Gabung	Dengan hormat untuk memenuhi surat Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, Nomor : 055/03/V/KI.Bali/2025, Tanggal 14 Mei 2025, Hal. Laporan Layanan Informasi Publik. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Diterima tanggal,
Penerima,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN
Arifin Efendi, ST., MT
NIP. 19710714 200003 1 003

Nomor telepon :



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





**BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI**

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tahun 2024

☎ (021) 31925567

✉ b.penghubung.bali@gmail.com

🌐 www.perwakilan.baliprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Ida Shang Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan anugrah-Nya Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 Badan Penghubung Provinsi Bali dapat terselesaikan. Laporan Layanan Informasi Publik ini disusun Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dengan tersusunnya Laporan Layanan Informasi Publik ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas ataupun kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Publik pada Badan Penghubung Provinsi Bali. Badan Penghubung Provinsi Bali telah memaksimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat dan optimalisasi informasi, Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik.

Kami menyadari dokumen Laporan Layanan Informasi Publik ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami membuka ruang untuk saran, kritik, dan masukan dalam rangka penyempurnaannya. Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat serta memberikan kontribusi yang berarti dalam memajukan transparansi, akuntabilitas dalam proses-proses pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali.



Jakarta, 20 Mei 2025

Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali

Arifin Efendi, ST, MT.

NIP. 19710714 200003 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
 BAB I GAMBARAN UMUM BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali.....	1
1. Tugas Pokok Badan Penghubung Provinsi Bali.....	1
2. Fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali.....	2
1.2 Visi dan Misi Badan Penghubung Provinsi Bali.....	2
1. Visi Badan Penghubung Provinsi Bali.....	2
2. Misi Badan Penghubung Provinsi Bali.....	3
 BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
2.1 Maklumat Pelayanan.....	6
2.2 Struktur Organisasi.....	8
 BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANANINFORMASI PUBLIK	
3.1 Sarana dan Prasarana.....	9
1. Ruang Layanan.....	9
2. Website.....	10
3. Media Sosial.....	11
4. Kontak Kami.....	12
5. Sarana dan Prasarana Penunjang Layanan Disabilitas.....	12
3.2 Sumber Daya Manusia (SDM).....	14



3.3 Anggaran.....	15
3.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
3.5 Kelompok Sasaran Layanan.....	17
3.6 Rincian Layanan Informasi Publik.....	18
3.7 Kendala Pada Badan Penghubung Provinsi Bali.....	25
3.8 Rencana Tindak Lanjut.....	26
1. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran.....	26
2. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran.....	27
BAB IV PENUTUP.....	30



BAB I

GAMBARAN UMUM

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

Badan Penghubung Provinsi Bali merupakan satu- satunya OPD Pemerintah Provinsi Bali yang berada diluar Pulau Bali tepatnya di Ibu Kota Jakarta. Badan Penghubung Provinsi Bali terbentuk berdasarkan amanat PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Badan Penghubung Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

INDIKATOR KINERJA : "TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PROFESIONAL PADA BADAN PENGHUBUNG"

Pelayanan yang dimaksud adalah :

- a. Pelayanan Hubungan Antar Lembaga
- b. Pelayanan promosi dan informasi
- c. Pelayanan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta
- d. Pelayanan tamu Wisma Badan Penghubung

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali

1. Tugas Pokok

Sesuai dengan Pergub Provinsi Bali Nomor 71 Tahun 2022 disebutkan bahwa Badan Penghubung Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.



2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Penghubung Provinsi Bali mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis dalam penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
2. pengelolaan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas badan;
3. pelaksanaan urusan tata usaha; dan
4. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Visi dan Misi Badan Penghubung Provinsi Bali

1. Visi



“Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945”.



2. Misi

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.
4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.
7. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara konprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komperhensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.



10. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan pelindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.
11. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sakala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/ Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
13. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar kabupaten/kota se-Bali.
14. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar kabupaten/kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas baru.
15. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara konprehensif.
16. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten/kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
17. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.
18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.
19. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang



memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.

20. Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
21. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang, hijau, indah, dan bersih.
22. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.



BAB II

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan Informasi merupakan hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi oleh masyarakat. pelayanan informasi publik yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Indonesia telah menjamin hak Warga Negara dalam memperoleh informasi publik melalui penetapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-Undang ini disebutkan bahwa Badan Publik, baik lembaga negara maupun organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri, wajib melaksanakan pelayanan informasi publik. Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di Badan Penghubung, terdapat beberapa komponen kunci yang dilaksanakan, antara lain:

2.1 Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan Publik adalah bentuk komitmen tertulis yang berisi kewajiban dan janji terhadap pemenuhan standar pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, terukur, dan untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas, keterbukaan dan keadilan) dalam memberikan layanan khususnya pada layanan informasi publik.







BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI



ຍສູ່ຍາໄປັບນພາສາລຳ ປູຕູ່ສາ

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

ດັກຊື່ສຳລັບປັກກູຕູກບັບນພາສາລຳ ປູຕູ່ສາ

DENGAN INI, KAMI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

ກະຊວງ ບັບກູຕູກບັບນພາສາລຳ ປູຕູ່ສາ

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

ຍັກກະຊວງ ປັກກູຕູກກະຊວງ ບັບນພາສາລຳ ປູຕູ່ສາ

MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN

ດັກບັບນພາສາລຳ ບັບກູຕູກ ບັບນພາສາລຳ ປູຕູ່ສາ

DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, SIAP MENERIMA SANKSI

ດັກບັບນພາສາລຳ ບັບກູຕູກ ບັບນພາສາລຳ ປູຕູ່ສາ

SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

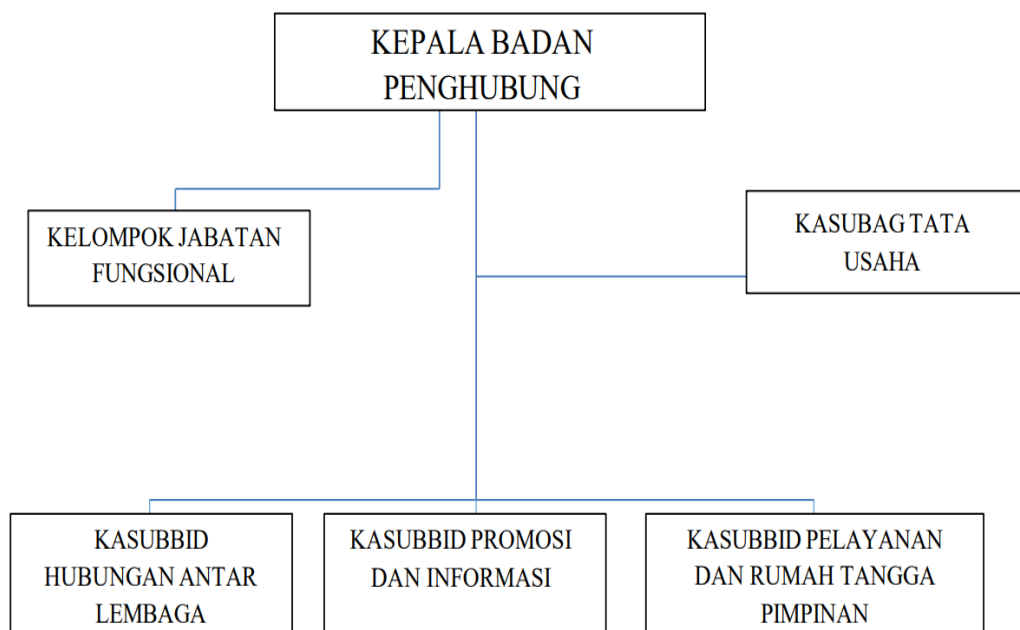


2.2 Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali

Nomor 25 Tahun 2023

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI



BAB III

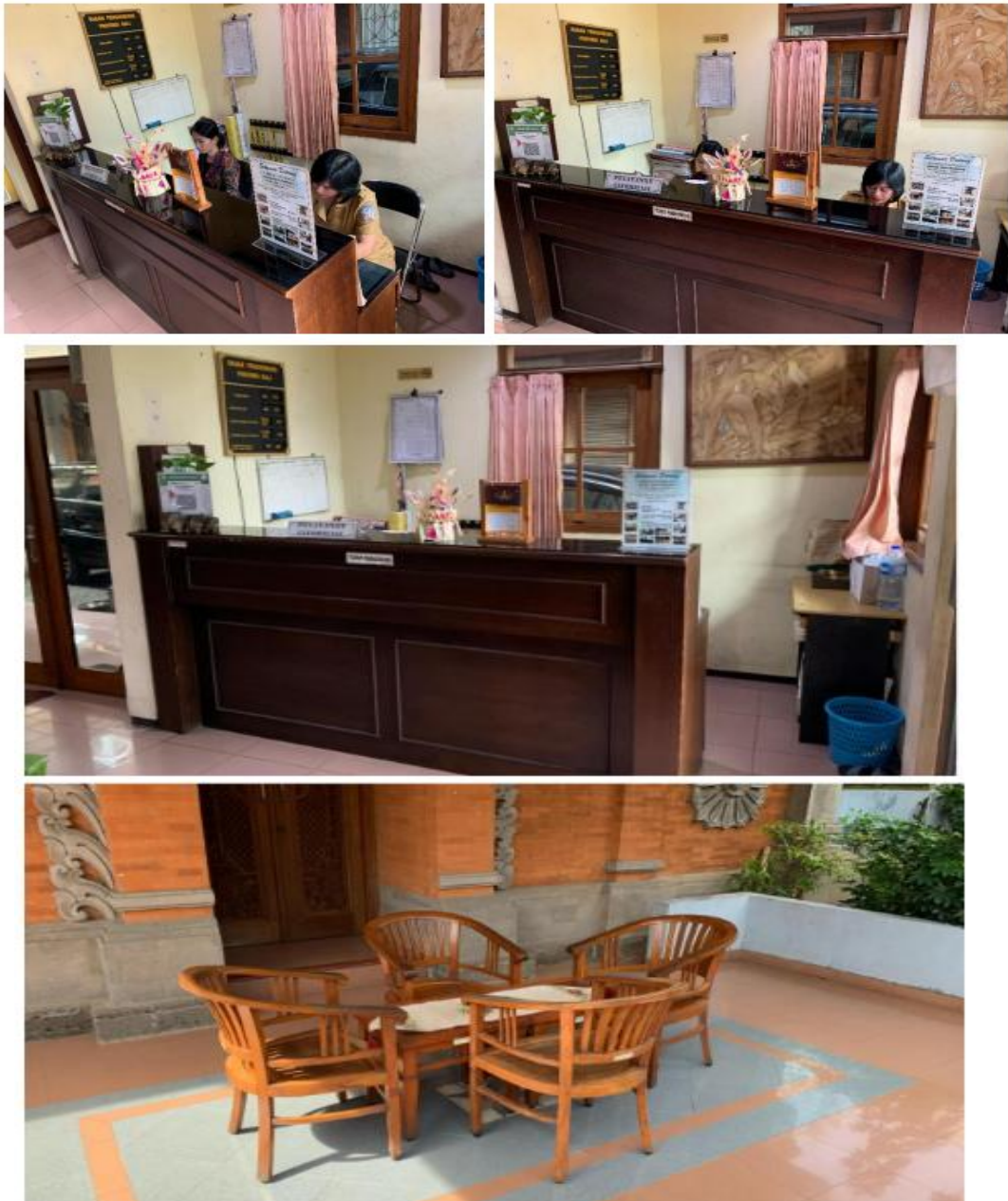
GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Sarana dan Prasarana

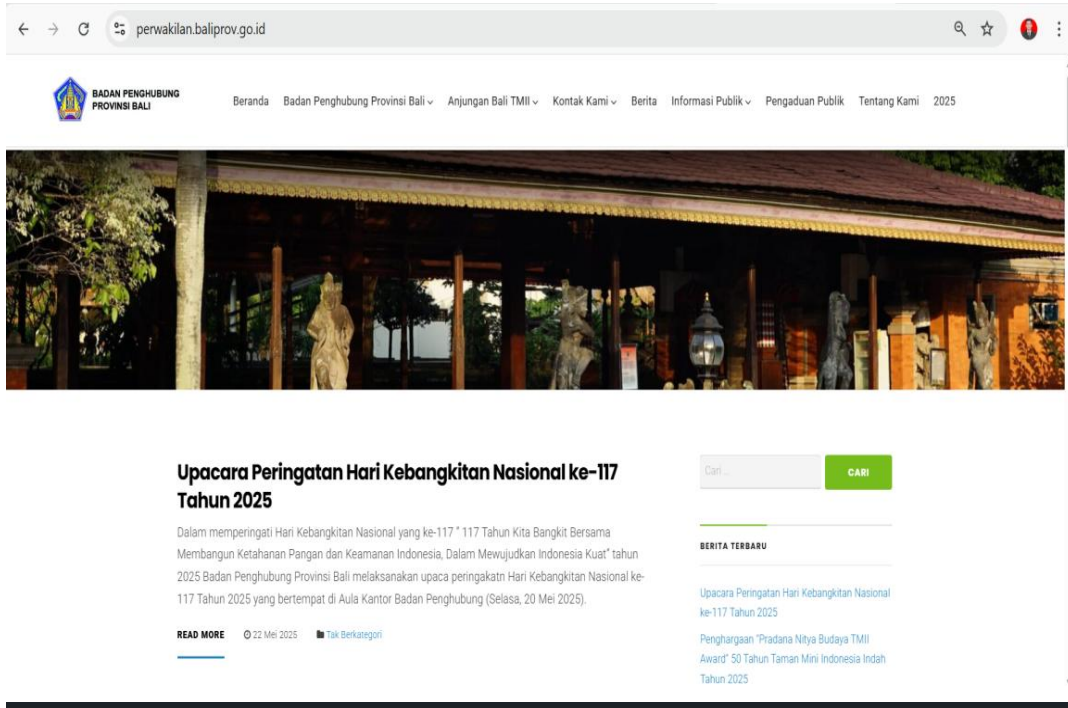
1. Ruang Layanan

Untuk mempermudah akses melakukan Permohonan informasi secara langsung, Badan Penghubung menyediakan ruang layanan informasi.



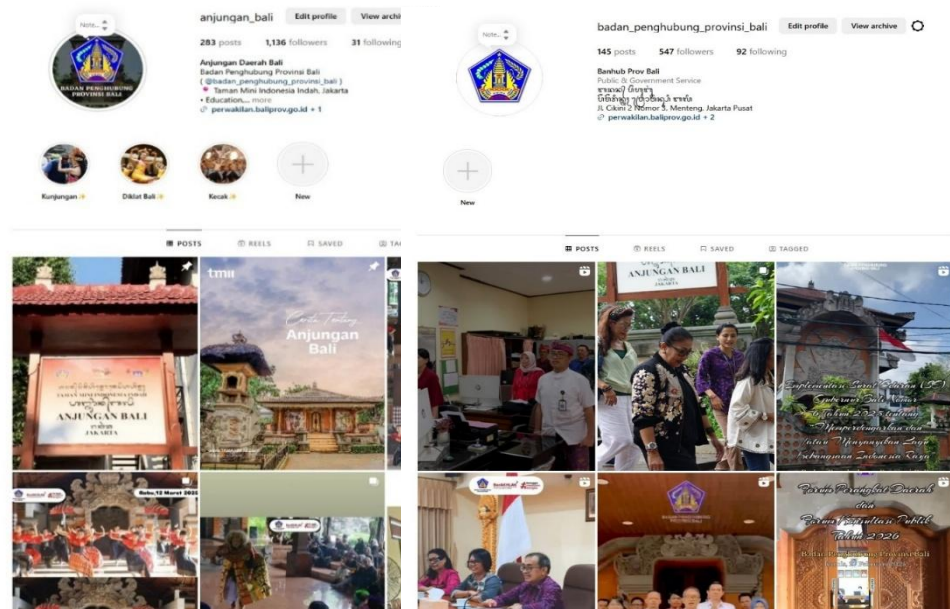
2. Website

Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi publik Badan Penghubung Provinsi Bali menyediakan website : <https://perwakilan.baliprov.go.id/> .



3. Media Sosial

Badan Penghubung Provinsi Bali memiliki Media Sosial *Instagram*(@badan_penghubung_provinsi_bali, @anjuangan_bali) dan *Facebook*(Banhub Prov Bali) khusus layanan informasi publik.



Banhub Prov Bali

209 teman • 57 bersama

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

Teman

Kirim pesan

Postingan

Foto

Video

Detail

badan_penghubung_provinsi_bali

Tinggal di Jakarta, Indonesia

Dari Jakarta, Indonesia

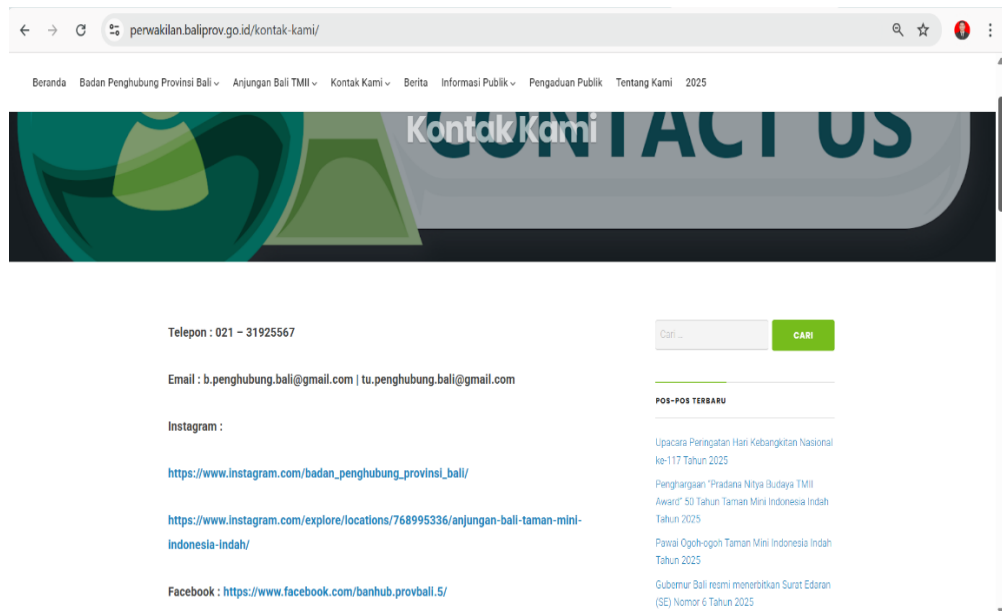
Bergabung pada September 2017

Lihat Info Tentang Banhub



4. Kontak Kami

Badan Penghubung Provinsi Bali menyediakan beberapa platform sebagai sarana komunikasi dan akses informasi bagi masyarakat. Salah satunya adalah layanan operasional pada Nomor Telpon kantor dan *whatsApp*admin. Sosialisasi Nomor Telpon kantor, Email, *Facebook* dan *whatsApp*admin dilakukan melalui website, media surat dan media sosial demi meningkatkan pelayanan yang lebih optimal.



5. Sarana dan Prasarana Penunjang Layanan Disabilitas

Dalam rangka menjamin kesetaraan hak setiap warga negara untuk mengakses informasi publik, Badan Penghubung menyediakan sarana dan prasarana khusus yang ramah bagi penyandang disabilitas.





3.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Badan Penghubung Provinsi Bali merupakan Unsur Penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat. Badan Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan Eselon III/a yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Penghubung merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan administrasi di bidang pelayanan terhadap pimpinan daerah dan pelayanan tamu yang menginap di wisma, pelayanan informasi di Anjungan Daerah Bali, dan Hubungan Antar Lembaga. Badan Penghubung Provinsi Bali mempunyai sumber daya manusia untuk menjalankan organisasi dengan jumlah pegawai di Tahun 2025 seluruhnya 46 orang (terdiri dari 15 orang PNS, 1 orang PPPK, 25 orang tenaga kontrak dan 5 orang tenaga alih daya). Keberhasilan dalam upaya mewujudkan kelancaran urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Bali di Ibu Kota Negara, Jakarta tergantung kualitas dan kuantitas faktor sumber daya manusia yang ada. Jumlah Pegawai Badan Penghubung Provinsi Bali per 28 April 2025 sebagai berikut :

Berdasarkan Golongan:

Golongan IV : 4 orang
 Golongan III : 7 orang
 Golongan II : 4 orang
 PPPK kelas X : 1 orang
 Kontrak : 25 orang
 Tenaga Alih Daya : 5 orang
 JUMLAH : 46 orang

Berdasarkan Pendidikan : (ASN)

Pasca Sarjana (S2) : 7 orang
 Sarjana (S1) : 5 orang
 Diploma/Sarjana Muda : - orang
 S.M.A : 4 orang
 JUMLAH : 16 orang



3.3 Anggaran

Dalam pelaksanaan tata kelola pelayanan Informasi Publik pada Badan Penghubung Provinsi Bali menyediakan anggaran sebesar Rp 403.355.400,- (empat ratus tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu ratus rupiah) anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa kegiatan layanan, antara lain :

- Belanja Alat/bahan sarana dan prasarana kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor, Bahan Cetak, dll
- Honorarium Moderator dan Narasumber, Pengajar Diklat Tari dan Gamelan Bali, Tim Kreatif

3.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pencapaian sasaran Rencana Strategi yang dicerminkan dari perolehan target pada Indikator Kinerja Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali. Indeks didapat dari kuesioner yang diberikan kepada semua penerima pelayanan, pelayanan yang dimaksud meliputi :

- Pelayanan Hubungan Antar Lembaga
- Pelayanan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta
- Pelayanan promosi dan informasi seni budaya Bali di Jakarta
- Pelayanan wisma penginapan pada Badan Penghubung Provinsi Bali bagi pimpinan, PNS ataupun orang umum

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (alasan) :
Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	pelayanan yang dimaksud meliputi : 1. Pelayanan Hubungan Antar Lembaga 2. Pelayanan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta



Bali		3. Pelayanan promosi dan informasi seni budaya Bali di Jakarta 4. Pelayanan wisma penginapan pada Badan Penghubung Provinsi Bali bagi pimpinan, PNS ataupun orang umum
------	--	--

Kinerja pelayanan Badan Penghubung Tahun 2024 sudah baik dan melebihi target. Namun meskipun sudah memenuhi target, permasalahan-permasalahan yang muncul di Tahun 2024 dikhawatirkan akan menghambat pencapaian target pelayanan di tahun berikutnya.

CAPAIAN SASARAN TAHUN 2024

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Indikator Kinerja Utama	Target RPD 2024-2026	Realisasi s.d Tahun 2024	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali :	90	89,83	90	89,83	99,81%
1. Indeks kepuasan penerima pelayanan Hubungan Antar Lembaga		90,59			
2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pembinaan masyarakat Bali di Jakarta melalui Badan Penghubung		88,80			
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Daerah Bali di Jakarta		89,25			



4. Indeks kepuasan pelanggan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali		92,17			
---	--	-------	--	--	--

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali dari Tahun 2020 s.d 2024

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	-	-	-	75	80	80	90	90	85,96	84,91	89,27	88,32	89,83	114%	106%	98,73%	98,13%	99,81%

3.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Badan Penghubung Provinsi Bali merujuk pada pihak-pihak yang menjadi target atau penerima manfaat dari layanan yang disediakan oleh Badan Penghubung tersebut. Secara umum, Badan Penghubung Provinsi Bali memiliki tugas untuk menjembatani komunikasi, koordinasi, dan fasilitasi antara Pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah pusat, instansi lain, serta masyarakat Bali di luar daerah, terutama di Ibu Kota Negara. Kelompok sasaran layanan Badan Penghubung Provinsi Bali dapat mencakup:

1. Pemerintah Pusat dan Lembaga Negara

Untuk menyampaikan kebijakan, aspirasi, atau informasi dari Pemerintah Provinsi Bali kepada pemerintah pusat, serta sebaliknya.

2. Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali/Kabupaten/Kota se-Bali

Dalam hal koordinasi dan fasilitasi urusan administrasi, rapat, dan kegiatan dinas di luar daerah (terutama di Jakarta). Serta membantu Kabupaten/Kota se-Bali untuk memfasilitasi pengambilan surat-surat dinas yang mengharuskan diambil oleh Badan Penghubung Provinsi Bali.



3. Masyarakat Bali di Perantauan

Terutama yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Misalnya, dalam bentuk pelayanan informasi, fasilitasi kegiatan budaya, dan dukungan administratif.

4. Lembaga Swasta dan Mitra Kerja

Dalam rangka kerja sama dan promosi potensi daerah Bali (pariwisata, budaya, investasi, dll).

5. Mahasiswa dan Pelajar Bali di Jakarta

Membantu mahasiswa Bali yang memerlukan tempat tinggal selama melaksanakan studi di Jakarta dengan menempatkan di Asrama Mahasiswa Rawamangun.

3.6 Rincian Layanan Informasi Publik

Berikut adalah Rincian Pelayanan Informasi Publik pada Badan Penghubung Provinsi Bali :

1. Pelayanan Informasi Publik terkait Wisma Badan Penghubung Provinsi Bali

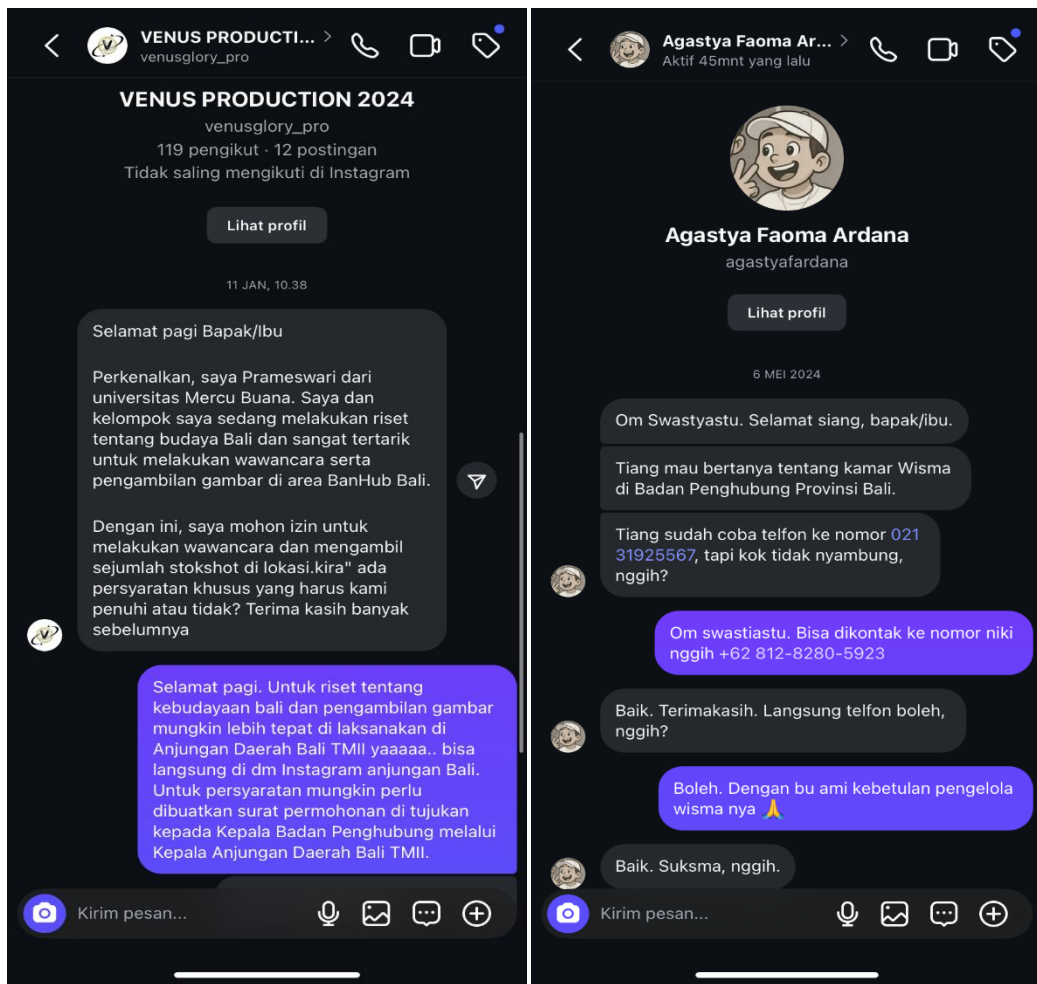
Laporan Penetapan

No	No Penetapan	Tanggal Penetapan	Nama OPD	Objek Retribusi	Kategori Retribusi	No WR	Wajib Retribusi	Total Tagihan	Status
1	0102/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-12-18	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000184	I Komang Suarsana	500.000	Sukses
2	0101/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-12-16	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000130	I Made Gede Arubawa	250.000	Sukses
3	0100/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-12-14	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000060	I Nyoman Gede Anon	250.000	Sukses
4	0099/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-12-14	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000137	I Ketut Sukra Negara dkk	250.000	Sukses
5	0098/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-12-14	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000006	I Wayan Srinah	250.000	Sukses
6	0097/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-12-11	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000152	I Made Sudarsana	250.000	Sukses
7	0096/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-12-11	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000183	Wayan Sunasa	500.000	Sukses
8	0095/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-12-10	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000182	Made Gede Yasa	500.000	Sukses
9	0094/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-12-10	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000125	Made Agus	500.000	Sukses
10	0093/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-12-05	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000181	Komang Witihari Savitri	500.000	Sukses
11	0092/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-12-03	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000180	Ni Ketut Ari Astini	500.000	Sukses



12	0091/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-12-03	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000179	LA Agung Istri Peranastuti	500.000	Sukses
13	0090/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-12-02	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000152	I Made Sudarsana	500.000	Sukses
14	0089/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-11-24	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000136	I Gusti Agung Ngarah Doo K.	750.000	Sukses
15	0088/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-11-21	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000178	Annastasia Riihena dkk	1.000.000	Sukses
16	0087/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-11-21	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000177	Ida Bagus Kade Dwi Widya Utama	750.000	Sukses
17	0086/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-11-17	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000176	I Gede Suralaga	1.000.000	Sukses
18	0085/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-11-16	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000175	I Gede Patu Udiyana P	250.000	Sukses
19	0084/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-11-14	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000174	I Wayan Galang Edy Sucipto	250.000	Sukses
20	0083/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-11-14	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000166	Frída	500.000	Sukses
21	0082/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-11-13	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000042	I Gusti Ngurah Pupu Udiyana	250.000	Sukses
22	0081/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-11-13	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000076	I Made Sudiarta	250.000	Sukses
23	0080/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-11-11	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000173	I Made Hary Pradnyadipita	250.000	Sukses
24	0079/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-11-11	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000157	Nyoman Sunarya	250.000	Sukses
25	0078/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-11-08	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000146	I Wayan Sumara Jaya	250.000	Sukses
26	0077/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-11-08	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000172	Kadek Adie Mertayasa	500.000	Sukses
27	0076/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-11-07	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000171	Tjok Istri Agung Damayanthi	250.000	Sukses
28	0075/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-11-06	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000170	I Dewa Gede Suharta	250.000	Sukses
29	0074/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-11-06	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000169	NI Luh Satriani	250.000	Sukses
30	0073/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-11-06	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000168	I Gat Ayu Nindya	500.000	Sukses
31	0072/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-11-01	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000166	Frída	500.000	Sukses
32	0071/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-11-01	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000167	Komang Kouma	500.000	Sukses
33	0070/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-10-30	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000027	I Gede Samsi Gunarta	250.000	Sukses
34	0069/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-10-29	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000061	Putu Sujatmanta	500.000	Sukses
35	0068/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-10-29	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000130	I Made Gede Artahawa	250.000	Sukses
96	0067/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-03-04	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000129	Bim ESDM	500.000	Sukses
97	0066/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-02-24	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000128	Arrip	750.000	Sukses
98	0065/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-02-06	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000006	I Wayan Serinah	500.000	Sukses
99	0064/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-01-19	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000127	Ida Bagus Gede Candawan	500.000	Sukses
100	0063/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-01-18	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000121	Dewa Gede Mahendra P	250.000	Sukses
101	0062/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-01-18	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000099	Humas	250.000	Sukses
102	0061/SKR-D/RETRIBUSI_PROV_BALI/2024	2024-01-15	-	Retribusi Penginapan Badan Penghubung Prov. Bali	Kepentingan Pemerintah Daerah - Sewa Kamar	40010000126	I Gusti Ngurah Mayun	500.000	Sukses





2. Pelayanan Informasi Publik Hubungan Antar Lembaga

No	Tanggal	Nama	Permohonan Informasi
1	20 Februari 2024	I Gusti Agung Made Wardika	Informasi terkait exit permit dan rekom visa (PDLN)
2	20 Februari 2024	Ni Luh Ayu Rai Saridarmini	Informasi terkait exit permit dan rekom visa (PDLN)
3	11 Mei 2024	Juang Oktavianus Totonafu Laoli	Informasi terkait exit permit dan rekom visa (PDLN)
4	19 Juli 2024	Ida Ayu Ismawati	Informasi terkait exit permit dan rekom visa (PDLN)
5	1 Agustus 2024	I Nyoman Yudiastrawan	Informasi terkait exit permit dan rekom visa (PDLN)
6	25 September 2024	I Gusti Ayu Diah Hendiari	Informasi terkait exit permit dan rekom visa (PDLN)



3. Pelayanan Informasi Publik Promosi dan Informasi Tatap Muka terkait Seni dan Budaya Bali (Anjungan Daerah Bali, TMII)

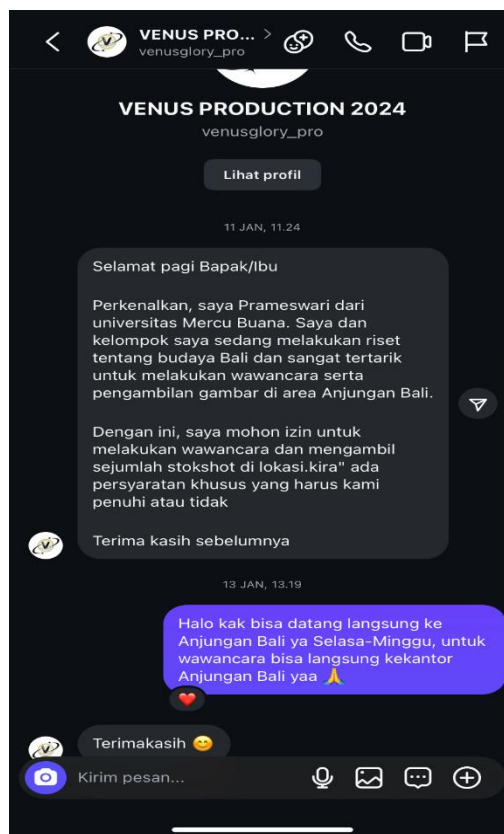
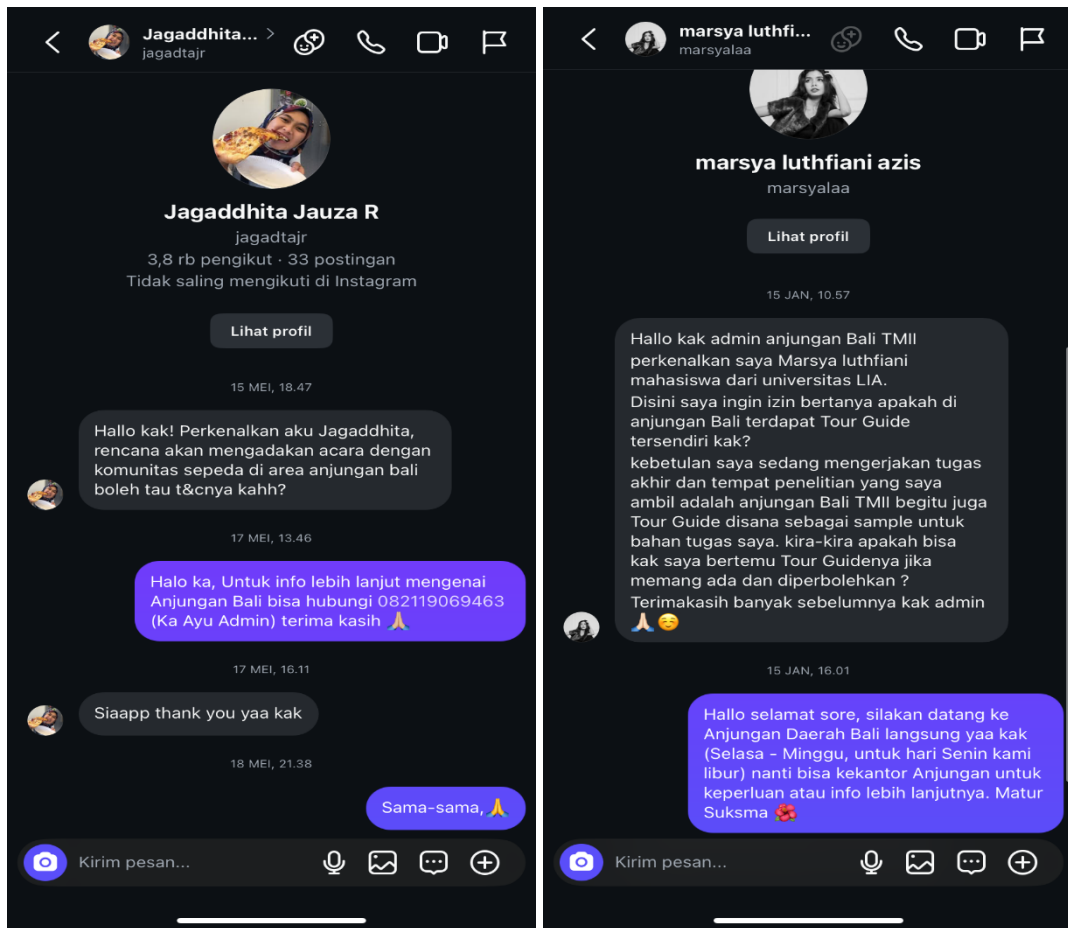
No.	Nama	Alamat / Jumlah Tamu	Tanda Tangan
1/11	Lily	Universitas Gunadarma / 6 orang	
2/11	Ruti Ariani dkk	Universitas Esa Unggul / Law / 7 orang	
3/11	Tiara Kartika	Universitas UIN JKT / 6 orang	
4/11	Ussadi	Bekasi (11)	
5/11	oval	TMII (4)	
6/11	Imam Firmansyah	Jl. Kemuning dlm 1 Gg H USman P. Mangrove (18)	
7/11	WAYAN SIDIK P	Purabaya, Lampung Tengah (5)	
8/11	MITY	Cibitax (3)	
9/11	Feryo	Penabur (15)	
10/11	Nur Perwata	Jakarta Timur (8)	
11/11	Kemakuran	From Japan (2)	
12/11	Amad	UNJ (10)	
13/11	Harstah	Bekasi (20)	

No.	Nama	Alamat / Jumlah Tamu	Tanda Tangan
1/11	Nasone	Jakarta utara (8)	
2/11	blory	Jakarta pusat (9)	
3/11	Fitti	Jakarta timur (3)	
4/11	stevy	Jakarta timur (8)	
5/11	BBK	Jakarta timur (17)	
6/11	Sekar	Bekasi (3)	
7/11	Masha	Jakarta timur (3)	
8/11	Wnee	Jakarta barat (12)	
9/11	yop gineing	Kidulunggal (7)	
10/11	Rahmah silatila	Jakarta Timur (3)	
11/11	Nayla & kaman kiman	Bekasi (1)	
12/11	M. Husein Nustanawati	Jakarta timur (8)	

No.	Nama	Alamat / Jumlah Tamu	Tanda Tangan
14/11/24	SD Sari Putra	Cikarang	
14/11/24	SMP N 31 Bdg	Jl. Binang Jati No. 139	
14/11/24	Mis Al Ihsan Japuz	Jl. Japuz	
14/11/24	SDN Ciluar 02	Bogor, Sukaraja	
14/11/24	Smp 18 Dams Sukam	Pondok Aren - Tangerang	
14/11/24	Ridwan Mubtaman	Pondok Gede (5)	
14/11/24	SDIT Mentari	Bekasi (60)	
14/11/24	SMA Galatia	Boulevard Arjuna Bekasi (12)	
14/11/24	Elmuro	Berosi	
14/11/24	Martih	Germany. (3)	
15/11/24	Adit	Jakarta. (1)	
15/11/24	Hilda	Jakarta (2)	
15/11/24	SD LABSCHOOL	CIBUBUR (5)	

No.	Nama	Alamat / Jumlah Tamu	Tanda Tangan
12/11/24	Yurni Iahitah	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (152)	
12/11/24	Pani	Gunadarma Paluwisara (31)	
12/11/24	Sekolah Bogor Raya	Bogor (94)	
12/11/24	Najwa Haqq	Jakarta Islamic Boarding School (1)	
12/11/24	Nendriana Dyah P	Tangerang (SIT Permata Auliyah) / 112	
12/11/24	Kurnia	Tangerang (1)	
13/11/24	Aduti Wuci Ark. A	SMPN 2 Sukarmulya (304 Pax)	
13/11/24	IRWANSYAH	Bogor	
13/11/24	TK Madania Jakarta	Jl. M. Kahfi I (344 Pax)	
13/11/24	Bagas Adi Prasetyo	Sukoharjo, Jawa Tengah (11 org)	
13/11/24	EGAN	BINTARU, TAMU - SEL (3)	
14/11/24	Syarik	Tangerang Selatan	
14/11/24	Fahmi	Pan deglang (3)	





3.7 Kendala Pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Bali ditingkat nasional, Badan Penghubung Provinsi Bali memiliki peran strategis sebagai perwakilan daerah yang menjembatani koordinasi kelembagaan, pelayanan pejabat dan tamu daerah, pembinaan masyarakat perantauan, serta promosi budaya dan pariwisata Bali. Namun, dalam pelaksanaan fungsi tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan dan kendala yang perlu mendapat perhatian dan penanganan strategis, sebagai berikut :

1. Kualitas Pelayanan yang Belum Optimal

Meskipun layanan yang diberikan telah mencakup berbagai fungsi keprotokolan dan fasilitasi pejabat/tamu daerah, namun masih dijumpai ketidakterpaduan dalam pelaksanaan pelayanan, baik dari segi Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem informasi pelayanan, hingga kualitas sumber daya pelaksana. Selain itu, sebagian proses layanan masih bersifat manual dan belum terdigitalisasi secara menyeluruh, yang berdampak pada efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik.

2. Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai

Kondisi gedung kantor dan fasilitas pendukung lainnya seperti Wisma Bali dan Anjungan Bali di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) memerlukan pemeliharaan dan revitalisasi secara berkelanjutan. Di sisi lain, perangkat teknologi informasi yang dimiliki belum cukup mendukung kebutuhan pelayanan berbasis digital, komunikasi kelembagaan, maupun dokumentasi kegiatan.

3. Promosi Budaya yang Belum Terstruktur

Kegiatan promosi seni dan budaya Bali yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung masih bersifat event-based dan belum terintegrasi dalam satu strategi promosi jangka menengah-panjang. Belum optimalnya kolaborasi dengan pelaku kreatif dan komunitas diaspora Bali di perantauan juga membatasi dampak promosi budaya secara luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.



4. Koordinasi Antar Lembaga yang Belum Optimal

Sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Bali di tingkat pusat, Badan Penghubung memiliki fungsi strategis dalam menjalin hubungan dengan kementerian/lembaga serta instansi pemerintah lainnya. Namun demikian, koordinasi kelembagaan tersebut masih bersifat administratif dan belum ditunjang oleh sistem informasi atau mekanisme pelaporan hasil koordinasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

5. Minimnya Pendataan dan Pembinaan Diaspora Bali

Belum tersedianya data dan informasi yang memadai mengenai masyarakat Bali di perantauan menjadi kendala dalam merancang program pembinaan yang relevan dan tepat sasaran. Selain itu, pembinaan yang dilakukan selama ini masih terbatas pada kegiatan sosial dan budaya yang bersifat simbolik, dan belum menyentuh aspek pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat Bali di luar daerah.

6. Keterbatasan Kapasitas SDM

Jumlah Sumber daya manusia yang tersedia di lingkungan Badan Penghubung relatif terbatas jumlahnya dibandingkan dengan cakupan tugas dan fungsi yang harus dijalankan. Selain itu, belum seluruh personel memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam bidang pelayanan publik, diplomasi budaya, pengelolaan kegiatan protokoler, maupun komunikasi kelembagaan.

3.8 Rencana Tindak Lanjut

1. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran

Guna meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional maka akan dilaksanakan strategi yaitu meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali melalui peningkatan:

1. Pelayanan Hubungan Antar Lembaga
2. Pelayanan terhadap masyarakat Bali di Jakarta melalui pembinaan umat



3. Pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Bali TMII secara khusus dan di Jakarta pada umumnya
4. Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu yang menginap di wisma Badan Penghubung Provinsi Bali

2. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran

Kebijakan yang dilaksanakan Badan Penghubung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan promosi di Anjungan Bali dengan meningkatkan kerjasama dengan sanggar-sanggar tari Bali dan Tabuh se-Jabodetabek, kerjasama dengan Disdagperin Provinsi Bali terkait pameran-pameran produk UMKM di Anjungan Bali TMII.
2. Memperkuat peranan Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta terkait upaya fasilitasi komunikasi dan koordinasi Pemprov Bali, kab/kota se-Bali dengan Pemerintah pusat, dengan rencana membuat forum komunikasi bagian umum kab/kota se-Bali dan surat-surat dari kementerian agar dapat terintegrasi dengan Kantor Virtual.
3. Berupaya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan promosi seni budaya tanpa menggunakan APBD, dengan cara pengajuan proposal-proposal kegiatan sosial, seni budaya ke BUMN-BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Jakarta.
4. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk pimpinan maupun tamu wisma Badan Penghubung, dengan memaksimalkan pengadaan sarana prasarana yang mendukung demi kenyamanan pimpinan dan tamu wisma.

Untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi



- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Sub kegiatan :

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- Administrasi keuangan perangkat daerah

Sub kegiatan :

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Administrasi umum perangkat daerah

Sub kegiatan :

- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub kegiatan :

- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub kegiatan :

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub kegiatan :

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan



- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya
- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program Pelayanan Penghubung

- Kegiatan pelaksanaan pelayanan Penghubung

Sub Kegiatan :

- Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat dengan output terlaksananya pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat Bali di Jakarta baik dalam bentuk seminar, semiloka, workshop atau pertemuan-pertemuan lainnya
- Fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya dengan output terlaksananya pagelaran rutin, pekan-pekan, paket khusus pesona budaya, dan pameran-pameran kuliner
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung dengan output lancarnya pelaksanaan/operasional tugas pimpinan/kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sedang bertugas ke Jakarta.



BAB IV PENUTUP

Laporan Layanan Informasi Publik disusun untuk melaporkan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Penghubung Provinsi Bali.

Laporan Layanan Informasi Publik pada Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2024 ini disusun dengan harapan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintahan khususnya pada Pemerintah Provinsi Bali.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan melimpahkan rahmat-Nya kepada segenap pegawai Badan Penghubung Provinsi Bali dalam melaksanakan tugasnya.

